

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/ PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada unit organisasi di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan;

- d. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- e. menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
- f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 JANUARI 2014


**NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Penugasan
1.	Dara Kumala Arumbuana, SE NIP. 19880101 201012 2 001 Penata Laporan Keuangan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
2.	Adreng Kusuma Ayuningtyas, S.Pi NIP. 19860912 201012 2 001 Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Calon Pustakawan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Otti Ilham Khair, S.T., M.Si. NIP. 19721016 199703 1 003 Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan Khusus BUMN/BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

6.	Ebrinda Daisy Gustiani, S.E., M.Si NIP. 19860823 201012 2 001 Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemprov dan BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Sri Aditya Nur Pratama, S.E. NIP. 19861220 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan e-Katalog	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Atmojo Heri Prasetyo, S.T. NIP. 19780902 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem E-Procurement	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Nungky Karina Putri, S.Psi NIP. 19890604 201211 2 001 Penyusun Bahan Bina Karir SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Erin Pratiwi Yulianti, A.Md NIP. 19860720 201012 2 001 Pengadministrasi Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi dan Direktorat Sertifikasi Profesi
12.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Seksi Wilayah Kalimantan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
13.	Indah Suci Pratiwi, S.E. NIP. 19860602 201012 2 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di

	Penyusun Bahan Pelayanan Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
14.	Anastasia Citra Puspita, SE NIP. 19850528 201012 2 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI